



SALINAN

BUPATI INTAN JAYA  
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA  
NOMOR 900.1.3-22 TAHUN 2026

TENTANG

PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PERANGKAT DAERAH DAN  
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INTAN JAYA  
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI INTAN JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Bupati menetapkan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas-tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada Perangkat Daerah atas usul PPKD sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Peubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang.../2

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya Di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah.../4

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

22. Peraturan Pemerintah.../5

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
30. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
31. Keputusan Presiden.../6

31. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002 tentang Tunjangan Khusus Bagi Provinsi Papua;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1);

39. Peraturan Daerah.../7

39. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 5);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 4);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 7);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2023 Nomor 5);
43. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 4);
44. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1.A Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1A);
45. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 11.A Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 11.A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11.A Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2020 Nomor 30);
46. Peraturan Bupati.../8

46. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah PKM Bilogai, PKM Pogapa, PKM Hitadipa, PKM Wandai, PKM Mbiandoga, PKM Agisiga, PKM Ugimba dan PKM Tomosiga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2020 Nomor 15);
47. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 19 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PERANGKAT DAERAH DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Mengangkat bendahara pengeluaran perangkat daerah, dan bendahara pengeluaran pembantu pada Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya tahun anggaran 2026 yang nama-namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana disebut dalam lajur 5 pada lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu sebagaimana diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan anggaran belanja perangkat daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU kepadanya diberikan tunjangan tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT.../9

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sugapa  
pada tanggal 13 Februari 2026

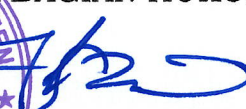
BUPATI INTAN JAYA,


TTD

ANER MAISINI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Papua Tengah di Nabire;
3. Ketua DPRD Kab. Intan Jaya di Sugapa;
4. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
5. Inspektur Kabupaten Intan Jaya di Sugapa;
6. Kepala BPPKAD Kab. Intan Jaya di Sugapa;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
MARAYA SUPULAYUK  
NIP. 19850323 201004 1 001



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA

NOMOR : 900.1.3-22 TAHUN 2026

TANGGAL : 13 Februari 2026

TENTANG : Pengangkatan Bendahara Pengeluaran  
Perangkat Daerah, Bendahara Pengeluaran  
Pembantu Unit Pelaksana Teknis Daerah  
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten  
Intan Jaya Tahun Anggaran 2026

No.	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	INSTANSI	JABATAN	KET.
1	2	3	4	5	6
1	CHRISTIAN TIMANG, ST NIP. 19881225 202407 1 001	PENATA MUDA III/a	Sekretariat Daerah	BENDAHARA PENGELUARAN	
2	DEUSLI DAUD LEVOD MANUARON, S.IP NIP. 19860418 202012 1 005	PENATA MUDA TK. I III/b	Sekretariat DPRD	BENDAHARA PENGELUARAN	
3	DEVI TANDI NIP. 19931218 202407 1 001	PENGATUR MUDA II/a	Inspektorat Daerah	BENDAHARA PENGELUARAN	
4	ERICK MAROETHA NTAHU, A.Md.Kep NIP. 19890105 201004 1 002	PENGATUR TK. I II/d	Dinas Pendidikan	BENDAHARA PENGELUARAN	
5	HASUDUNGAN SITOANG, AMG NIP. 19810515 200605 1 002	PENATA MUDA III/a	Dinas Kesehatan	BENDAHARA PENGELUARAN	
6	SEPTIAN EDDY SAPUTRA, A.Md NIP.19850907 201505 1 001	PENATA MUDA III/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	BENDAHARA PENGELUARAN	
7	NATALIA STELA SAHUSILAWANE, A.Md.Tek NIP. 19871219 202012 2 006	PENGATUR TK. I II/d	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	BENDAHARA PENGELUARAN	
8	ISAK WETAPO, A.Md NIP. 19910326 201505 1 002	PENGATUR TK. I II/d	Dinas Sosial	BENDAHARA PENGELUARAN	

No.	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	INSTANSI	JABATAN	KET.
1	2	3	4	5	6
9	NATALIS BELAU NIP. 19820912 201505 1 001	PENGATUR II/c	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BENDAHARA PENGELUARAN	
10	ALVIN PATTY NIP. 19910111 202407 2 001	PENGATUR MUDA II/a	Dinas Ketahanan Pangan	BENDAHARA PENGELUARAN	
11	VERONIKA PABANNANGAN NIP. 19890215 202407 2 002	PENGATUR MUDA II/a	Dinas Lingkungan Hidup	BENDAHARA PENGELUARAN	
12	FIDEL MANGGAPI, SE NIP. 19901312 202012 1 010	PENATA MUDA TK. I III/b	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	BENDAHARA PENGELUARAN	
13	MARKUS MANDO NIP. 19900610 202407 1 001	PENGATUR MUDA II/a	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	BENDAHARA PENGELUARAN	
14	RHEZA ABDI PUTRA NIP. 19930805 201505 1 001	PENGATUR II/c	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	BENDAHARA PENGELUARAN	
15	SEMUEL AYUB KAWER NIP. 19870306 202407 1 001	PENGATUR MUDA II/a	Dinas Perhubungan	BENDAHARA PENGELUARAN	
16	APIANUS YARINAP NIP. 19930312 202407 1 001	PENGATUR MUDA II/a	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	BENDAHARA PENGELUARAN	
17	RESLYAWATI ELISABETH L, A.Md NIP. 19850915 202012 2 004	PENGATUR II/c	Dinas Pemuda dan Olah Raga	BENDAHARA PENGELUARAN	
18	MAYKEL TULAK NIP. 19950808 202012 1 008	PENGATUR MUDA TK. I II/b	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	BENDAHARA PENGELUARAN	
19	SIMON KAIWAY NIP. 19780418 201503 1 002	PENGATUR MUDA II/a	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	BENDAHARA PENGELUARAN	
20	FIRDAUS GUSTI LALANG, S.Pt NIP. 19920813 202012 1 004	PENATA MUDA TK. I III/b	Dinas Peternakan dan Perikanan	BENDAHARA PENGELUARAN	

No.	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	INSTANSI	JABATAN	KET.
1	2	3	4	5	6
21	ARMIATI, S.Pd NIP. 19860721 201004 2 003	PENATA TK. I III/d	Dinas Kebudayaan dan Parawisata	BENDAHARA PENGELUARAN	
22	YERMIAS SANI, S.T NIP. 19790610 201104 1 001	PENATA MUDA III/a	Dinas Pertanian dan Perkebunan	BENDAHARA PENGELUARAN	
23	YOICE SUSANA AIBEKOB NIP. 19820921 201004 2 002	PENGATUR II/c	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	BENDAHARA PENGELUARAN	
24	APINUS BAGUBAU NIP. 19970313 202012 1 005	PENGATUR MUDA II/a	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	BENDAHARA PENGELUARAN	
25	ROY MIRIP, S.A.P NIP. 19991101 202506 1 012	PENATA MUDA III/a	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	BENDAHARA PENGELUARAN	
26	JUMADIL, A.Md NIP. 19890704 201505 1 001	PENGATUR TK. I II/d	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	BENDAHARA PENGELUARAN	
27	AGUSTINA RAPA', S.E NIP. 19930817 202407 2 001	PENATA MUDA III/a	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	BENDAHARA PENGELUARAN	
28	ADRIANUS KAYAI NIP. 19910416 202012 1 004	PENGATUR MUDA II/a	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	BENDAHARA PENGELUARAN	
29	SUCI ROHMADHON, ST NIP. 19940223 202012 1 005	PENATA MUDA III/a	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BENDAHARA PENGELUARAN	
30	DENOS MARIANUS W. GAYAMPA NIP. 19850912 201104 1 003	PENGATUR TK. I II/d	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	BENDAHARA PENGELUARAN	
31	APRILIUS SONDEGAU NIP. 19950204 202407 1 001	PENGATUR MUDA II/a	Distrik Sugapa	BENDAHARA PENGELUARAN	

No.	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	INSTANSI	JABATAN	KET.
1	2	3	4	5	6
32	YESKIEL BAGAU NIP. 19910115 201104 1 001	PENGATUR II/c	Distrik Homeyo	BENDAHARA PENGELUARAN	
33	SERWANUS NAGAPA NIP. 19900114 201505 1 003	PENGATUR II/c	Distrik Mbiandoga	BENDAHARA PENGELUARAN	
34	DANA ESTER FLORA SEMBOR, S.Ip NIP. 19870822 202012 2 007	PENATA MUDA TK. I III/b	Distrik Agisiga	BENDAHARA PENGELUARAN	
35	NELLI BILAMBANI NIP. 19900423 202012 2 009	PENGATUR MUDA II/a	Distrik Hitadipa	BENDAHARA PENGELUARAN	
36	MARTEN UGIPA NIP. 19900926 202407 1 001	PENGATUR MUDA II/a	Distrik Wandai	BENDAHARA PENGELUARAN	
37	AHASIWEROS ELIA OGAJAU NIP. 19930807 202012 1 006	PENGATUR MUDA TK. I II/b	Distrik Tomosiga	BENDAHARA PENGELUARAN	
38	DEKINIUS TIPAGAU NIP. 19920114 202407 1 001	PENGATUR MUDA II/a	Distrik Ugimba	BENDAHARA PENGELUARAN	

BUPATI INTAN JAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



TTD

ANER MAISINI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA  
 NOMOR : 900.1.3-22 TAHUN 2026  
 TANGGAL : 13 Februari 2026

TENTANG : Pengangkatan Bendahara Pengeluaran  
 Perangkat Daerah, dan Bendahara  
 Pengeluaran Pembantu Unit Pelaksana  
 Teknis Daerah di Lingkungan  
 Pemerintah Kabupaten Intan Jaya  
 Tahun Anggaran 2026

No.	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	INSTANSI	JABATAN	KET.
1	2	3	4	5	6
1	MUHAMMAD ALFATH, A.Md.Kep NIP. 19930829 202407 1 001	PENGATUR II/c	Rumah Sakit Umum Daerah Intan Jaya	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
2	MARIANA YARINAP, A.Md.Keb NIP. 19900816 202012 2 007	PENGATUR II/c	Puskesmas Distrik Agisiga	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
3	RESTI, A.Md.Kep NIP. 19871014 201104 2 001	PENATA MUDA TK. I III/b	Puskesmas Distrik Sugapa	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
4	YOPPY SANI, A.Md.Kep NIP. 19910101 201505 1 001	PENGATUR TK. I II/d	Puskesmas Distrik Hitadipa	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
5	MARTHINA BAGAU NIP. 19770321 200701 2 018	PENGATUR TK. I II/d	Puskesmas Distrik Mbiandoga	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
6	PERILA HOLOMBAU, A.Md.Kep NIP. 19990202 202012 2 001	PENGATUR II/c	Puskesmas Distrik Wandai	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
7	ASER TIPAGAU, A.Md.Kep NIP. 19900423 201511 1 001	PENGATUR TK. I II/d	Puskesmas Distrik Homeyo	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
8	RANNY PANGALA NIP. 19931124 202407 2 001	PENGATUR MUDA II/a	Sekretariat Daerah	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	

No.	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	INSTANSI	JABATAN	KET.
1	2	3	4	5	6
9	KRISTOVEDUS ZONGGONAU, S. Kom NIP. 19890913 202407 1 001	PENATA MUDA III/a	Sekretariat Daerah	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
10	UDIMAN WAKERKWA NIP. 19930313 202407 1 001	PENGATUR MUDA II/a	Sekretariat Daerah	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	

Selimen sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI